**PERANAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN SANGATTA UTARA**

**KABUPATEN KUTI TIMUR**

**Artanti[[1]](#footnote-1)**

**ABSTRACT**

This research is motivated by a problem where the influence of the role of the Camat is not optimal in improving employee performance. then a leader must be truly - qualified to be able to lead his subordinates well so that productivity and organizational goals can be achieved effectively and efficiently. Camat has functional authority to supervise employees under their leadership. The role of the Camat in improving employee performance at the Sangatta North District Office, it is desirable that the employees be directed and professional, so that it is easier to achieve a goal to be achieved with employees in the Sangatta North District office. Lack of employee discipline because there are still employees who are not on time to enter the office, employees tend to ignore work when the Camat is not in place. In this case, the Head of District must be able to encourage the performance of employees by encouraging, directing and motivating employees to work together in realizing the vision, mission and values ​​of the organization.

This study aims to determine the role of North Sangata Sub-District Chief in improving employee performance by using theory according to Henry Mintzberg (2000) that the roles usually run by leaders in improving a performance, namely; role a. Interpersonal Role such as Figure head, Leader, Liasion. b. Decison Making (Role of decision makers) such as Entreprenuer, Distrubance handler, Resource allocation, Negotiator. c. Informational role (Role of information sources) such as Monitor and Dessiminator, Spoke person. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and document study techniques.

The results of the study show that the role of the Sangatta North Sub-district in improving employee performance at the Sangatta North Sub-District Office always carries out its role as an interpersonal role, decision making and informational role in improving employee performance at the Sangatta North District Office

***Keywords* :** North Sanggatta, Role of Camat, Discipline

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah menerangkan tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota. Artinya, apabila dulu kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintah, selain nasional, propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kota administrative, dengan memandang kecamatan sebagai bentuk organisasi, maka kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan adalah upaya rasional yang harus dilakukan untuk keberhasilanya.

Selain menjalankan kewenangan yang dilimpahkan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 19 Tahun 2008, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja dan tidak memiliki daerah kewenangan), karena ditugasi untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam mengkoordinir seluruh instansi pemerintahan di wilayah kerjanya, mengkoordinir penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, mengkoordinir penegakan peraturan perundang-undangan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan atau instansi pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan tersebut.

Camat juga memiliki kekhususan dibanding dengan perangkat daerah lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan azaz desentralisasi yaitu adanya kewajiban untuk mengintegrasi-kan nilai-nilai sisio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara filosofis, pemerintah kecamatan tidak hanya perlu diperkuat dengan aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan saja. Namun tidak kalah pentingnya adalah daya dukung kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawainya guna mewujudkan tujuan organisasi/lembaga kecamatan dalam segala aspek. Termasuk dalam hal pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat guna memperoleh pelayanan administrasi seperti kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Kelahiran (AK), dan lainsebagainya.

Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran pemimpin yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi/lembaga, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan.

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi/lembaga, demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/lembaga baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, mengarah-kan semua potensi pegawai dilingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap pegawai agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen organisasi/lembaga sehinga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi.

Kantor Kecamatan Sangatta Utara merupakan Kecamatan yang memiliki letak strategis yang berada di tenggah-tenggah kota dimana masyarakatnya cenderung modern dan mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur pemerintah harus mempunyai kinerja yang tinggi. Hal ini tidak akan terwujud jika peran dalam kepemimpinan seorang camat dalam meningkatkan kinerja pegawainya rendah.

Berkaitan dengan betapa pentingnya konsep kepemimpinan yang ada di kantor Kecamatan Sangatta Utara, ternyata masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini disebabkan adanya perangkat non PNS yang kurang memadai dan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dipengaruhi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga terdapat perbedaan motivasi dalam berprestasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan bagi pimpinan dalam memberikan motivasi dan disiplin bagi pegawai guna dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kepemimpianan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Sangatta Utara, dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai baik secara internal maupun eksternal serta mencari solusi dalam permasalahana tersebut.

**II.PERUMUSAN**

Bagaimana peran Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor kecamatan sangatta utara kabupaten kutai timur.

**III. METODE PENELITIAN**

Camat selaku pimpinan senantiasa membangun hubungan dengan bawahannya, komunikasi yang terjalin antara pegawai dengan camat sendiri sudah berjalan dengan baik, bahkan dalam keseharianya baik itu yang menyangkut urusan pekerjaan atau hanya komunikasi biasa, camat sudah menciptakan suasana keakraban terhadap pegawai kantor.

Dengan komunikasi yang baik juga akan mendorong motivasi pegawai karena secara tidak langsung kebiasaan-kebiasaan komunikasi yang lancar akan memberikan rasa nyaman bagi pegawai sehingga mereka akan merasa senang dan lebih semangat dalam bekerja. Dalam menjalankan komunikasi itu sendiri camat juga sering kali langsung terjun ke ruangan meskipun hanya sekedar berkeliling untuk komunikasi.

Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawagan pimpinan dapat mengetahui kemampuan kinerja bawahannya secara langsung. Kemampuan kinerja merupakan salah satu kreteria yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yang ada dalam organisasi. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan camat, bahwa selama ini kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing personil pegawai kantor sudah cukup baik dan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pegawai yang sudah mampu menyelesaikan pekerjaan di bidang masing-masing sesuai dengan tupoksi yang ada serta rasa tanggug jawab yang tinggi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dan untuk menambah wawasan atau pengalaman bagi pegawai, Pak camat juga merasa puas dengan kemampuan personilnya dalam memberi ide atau sumbangan yang berupa gagasan baru untuk program kantor.

**4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.3.1 Peran pemimpin dalam *interpersonal role* (peranan pribadi)**

1. ***Figurehead***: peran yang diperlukan untuk menjalankan sejumlah kegiatan yang bersifat legal dan social.

Dalam peran ini peran pemimpin Kantor Camat dalam menjalankan perannya sebagai *figurehead* dimana Camat rajin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat legal dan sosial seperti upacara bertindak sebagai pemimpin upacara bersama pegawai-pegawai Kantor Kecamatan Sangatta Utara setiap hari senin dan menghadiri undangan-undangan dari organasasi-organisasi publik yang mengundangnya sebagai pembicara atau pemateri. Wawancara tentang peran *figurehead* :

Menurut Hj. Nur Latifah, S.Sos, sebagai Kepala Bagian Umum mengatakan bahwa :

“Setiap hari senin itu bapak pasti menghadiri upacara bersama hari senin selama beliau memimpin, beliau tidak pernah tidak menghadiri upacara dan terkait dengan undangan-undangan dari luar ataupun dari dalam beliau juga pasti menghadirinya namun terkadang undangan beliau sebagai pemateri biasanya ada yang bertabrakan jadi beliau yang memilih undangan salah satunya. **(Wawancara pada tanggal 3 april 2019)**

Menurut Susilo sebagai seksi pemerintana kantor camat sangatta utara mengatakan bahwa :

“ketika ada kegiatan yang diselenggarakan di kantor beliau pasti turut hadir meramaikan kegiatan tersebut seperti kegiatan go green, go cycling setiap hari minggu pasti beliau hadir, dan beliau juga senantiasa mengajak kami ketika ada kegiatan seperti itu.” **(wawancara pada tanggal 3 april 2019)**

Dari kutipan wawancara tersebut memaparkan bahwa peran Camat sebagai *figurehead* dijalankan dengan sangat baik dimana untuk meningkatkan kinerja pegawainya dia harus memberi contoh kepada pegawainya untuk menjalankan organisasi dengan sungguh-sungguh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Sangatta Utara dalam menjalankan peran pemimpin bersifat interpersonal yang diukur berdasarkan figur sudah cukup baik. Terbukti bahwa Camat Sangatta Utara dapat menjalankan perannya sebagai figurehead, yakni peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinannya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.

1. ***Leader*** : peran yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengarahkan bawahan

Dalam peran ini peran pemimpin kantor kecamatan sangatta utara dalam menjalankan perannya sebagai *Leader* yang dimana Camat terus melakukan motivasi terhadap pegawai-pegawai yang ditemuinya dan mengawasi kemajuan pegawainya serta memberikan pengarahan yang efektif bagi pegawainya. Wawancara tentang peran *leader :*

Menurut Noorma sebagai seksi pelayanan publik kantor kecamatan sangatta utara mengatakan bahwa :

“Kami disini setiap ketemu dengan beliau pasti selalu mengatakan kepada kami kerja yang ikhlas, kerja yang profesional, selalu lakukan inovasi dalam menjalankan tupoksi dan itulah yang kami beliau memotivasi diri kami sebagai bawahannya untuk bekerja lebih baik.” **(wawancara pada tanggal 3 april 2019)**

Menurut Susilo sebagai seksi pemerintana kantor camat sangatta utara mengatakan bahwa:

“ketika kami sedang bekerja dan mengalami kendala beliau. Beliau sangat mudah ditemui dan memberi kami bimbingan untuk menghadapai kendala tersebut dan juga beliau memberikan kami petunjuk-petunjuk yang bisa berguna bagi pekerjaan kami, sepeti melakukan kerja sama” **(wawancara pada tanggal 3 april 2019)**

Dari kutipan wawancara tersebut membuktikan bahwa peran *leader* dijalankan dengan baik oleh Camat, karena dalam peran *leader*lah pemimpin bisa memotivasi pegawainya sehingga kinerja pegawai bisa meningkat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam menjalankan perannya pemimpin bersifat interpersonal y

**III. METODE PENELITIAN**

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.2 Hasil Penelitian**

Analisis Statistik Deskriptif adalah variabel terikat, variabel bebas dan variabel kontrol, penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam Undang undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*.* Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan daerah secara keseluruhan maupun dalam ruang lingkup pedesaan karena wajib pajak merupakan obyek pajak yang merupakan pengerak pembangunan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu berbagai hal diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan.

### 4.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan tersebut dapat diraih karena adanya upaya antara lain dilakukannya intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan mutu layanan, mendekatkan tempat pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT Keliling dan semakin membaiknya perekonomian masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara absolut. Pajak daerah merupakan pemberi kontribusi terbesar dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari total Pendapatan Daerah selama Tahun anggaran 2013 sampai dengan Tahun 2017, Kontribusi yang terbesar adalah berasal dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagian besar masih didukung dana dari Pendapatan Daerah (PAD) dan Pemerintah Pusat. Dari beberapa sumber pajak daerah, sejak kurun waktu tahun 2013-2017, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar dibandingkan dengan jenis penerimaan daerah dari Pajak Daerah yang lain. Jika diperhatikan secara menyeluruh selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2017, Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan kontribusi lumayan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2003**.** Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota, dalam Peraturan Daerah yang menjadi obyek pajak adalah pengguna hak tanah dan bangunan.

# Tabel 4.4 Penerimaan PKB tahun 2013-2017, dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur tahun 2013-2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan PKB Kabupaten Kutai Timur (Rp) |
| 2013 | 5,215,795,794 |
| 2014 | 6,768,217,997 |
| 2015 | 5,258,512,140 |
| 2016 | 6,326,388,246 |
| 2017 | 6.418,335,193 |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

### 4.2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah di kabupaten Kabupaten Kutai Timur merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pada wajib pajak. Penarikan pajak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur di berbagai subsektor dalam meningkatkan Pajak daerah yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening dan disetorkan ke Bapeda. Potensi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam merencanakan dan menghitung pendapatan daerah secara tepat. Hal demikian dapat dijadikan sarana untuk mengetahui kemampuan pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi dari potensi pendapatan daerah setempat, sebelum melakukan berbagai macam pembiayaan dari sumber lain, termasuk dari pos pinjaman daerah. Lebih jauh diungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Potensi Pajak daerah di kabupaten Kabupaten Kutai Timur sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan pajak daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki penerimaan cukup besar dari penerimaan pos-pos Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah berbagai subsektor diharapkan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 4.2.3 Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Tingkat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kabupaten Kutai Timur dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

# Tabel 4.5 Analisis efektivitas PKB Tahun 2013-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target Potensi  PKB ((Rp) | Realisasi  PKB (Rp) | Efektivitas  PKB (%) | Keterangan |
| 2013 | 4,451,137,193 | 5,215,795,794 | 117.18 | Sangat Efektif |
| 2014 | 4,783,792,531 | 6,768,217,997 | 141.48 | Sangat Efektif |
| 2015 | 4,131,456,244 | 5,258,512,140 | 127.28 | Sangat Efektif |
| 2016 | 4,229,983,144 | 6,326,388,246 | 149.56 | Sangat Efektif |
| 2017 | 4,500,110,060 | 6.418,335,193 | 142.63 | Sangat Efektif |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan tabel penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun 2013 – 2017, untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. Tingkat efektivitas mulai tahun 2013 yaitu sebesar 117.18 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2013 termasuk pada kategori sangat Efektif. Dan pada tahun 2014 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 141.48 %, termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 127.28 % termasuk dalam kategori sangat efektif. Diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 149.56 % yang termasuk dalam kategori sangat efektif pada tahun 2016. Dan pada Tahun 2017 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 142.63 % termasuk dalam katagori sangat efektif.

### 4.2.4 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan kita dapat mengetahui seberapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama tahun pengamatan, berikut ini adalah tabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama kurun waktu 4 tahun dari Tahun 2013-2017 dapat kita lihat sebagai berikut :

# Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi PKB (Rp) | Persentase Laju Pertumbuhan (%) |
| 2013 | 5,215,795,794 | - |
| 2014 | 6,768,217,997 | 29.76 |
| 2015 | 5,258,512,140 | -22.31 |
| 2016 | 6,326,388,246 | 20.31 |
| 2017 | 6.418,335,193 | 1.45 |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 dan 2016 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan menjadi -22.31 % pada Tahun 2015.

### 4.2.5 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Timur dihitung dengan membandingkan jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah (PAD). Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

# Tabel 4.6 Analisis Kontribusi Realisasi PKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun 2013-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi PKB (Rp) | Realisasi PAD  (Rp) | Kontribusi (%) | Keterangan |
| 2013 | 5,215,795,794 | 40,423,494,270 | 12.90 | Kurang |
| 2014 | 6,768,217,997 | 43,874,493,673 | 15.43 | Kurang |
| 2015 | 5,258,512,140 | 38,882,955,230 | 13.53 | Kurang |
| 2016 | 6,326,388,246 | 35,197,940,016 | 17.97 | Kurang |
| 2017 | 6.418,335,193 | 34,441,606,089 | 18.64 | Kurang |

Sumber: *SAMSAT Kabupaten Kutai Timur*

Berdasarkan data tabel diatas, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Tahun 2013 sebesar 12.90 % dapat dikategorikan pada kriteria kurang, Pada Tahun 2014 kontribusi penerimaan PKB mengalami peningkatan menjadi 15.43 %, sedangkan pada tahun 2015 kontribusi penerimaan PKB mengalami penurunan, sehingga kontribusinya sebesar 13.53 %, sehingga dapat dikategorikan pada kriteria kurang, penerimaan PKB mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turus yaitu pada tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing 17.97 % di tahun 2016 dan 18.54 % pada tahun2017, dan dapat dikatagorikan dalam kritaria kurang.

**4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Kabupaten Kutai Timur dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan perkapita sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan.

Berdasarkan APBD, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Daerah yang potensial terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air (PKA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar Kabupaten Kutai Timur.

Penerimaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun 2013 - 2017 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. Tingkat efektivitas mulai tahun 2013 yaitu sebesar 117.18 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2013 termasuk pada kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2014 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 141.48 %, termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 127.28 % termasuk dalam kategori sangat efektif, pada tahun 2016 diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 149.56 % yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Dan pada Tahun 2017 diperoleh efektivitas penerimaan PKB sebesar 142.63 % termasuk dalam katagori sangat efektif.

Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 dan 2016 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan menjadi -22.31 % pada Tahun 2015.

Realisasi penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagai pembanding terhadap pendapatan daerah karena pada tahun 2013-2017, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD Tahun 2013 adalah sebesar 12.90 % dapat dikategorikan sebagai kriteria kurang, pada tahun 2014 kontribusi penerimaan PKB meningkat menjadi 15.43%, untuk tahun 2015 kontribusi penerimaan PKB adalah sebesar 13.53 %, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan dapat dikategorikan pada kriteria kurang. Kontribusi pada Tahun 2016 adalah sebesaar 17.97 % dapat dikatagorikan sebagai kurang. Dan terjadi lagi peningkatan pada Tahun 2017 menjadi 18.64 %, dapat dikatagorikan sebagai kurang.

Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun secara absolute, hal ini menggambarkan adanya perkembangan yang cukup baik dalam pengeloaan pajak daerah, yang diharapkan penerimaan daerah dari Pajak kendaraan bermotor dapat dijadikan sumber pembiayaan yang manjadi harapan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Jumlah kendaraan roda II dan roda IV terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dimana kendaraan bermotor baik roda II maupun roda IV tidak lagi dianggap kebutuhan mewah melainkan merupakan kebutuhan primer dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan daerah yaang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber penerimaan daerah sangat penting dan perlu harus dikelola dengan baik guna menunjang penerimaan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur.

Peningkatan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari kontribusi PKB yaitu dengan adanya penerapan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) karena semakin banyak wajib pajak yang rutin membayar pajaknya maka otomatis penerimaan daerah makin meningkat. Sementara itu peningkatan kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT keliling juga sangat penting karena akan lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya dan lebih efisien dan efektif. Dan juga peningkatan jual beli kendaraan bermotor roda II maupun roda IV akan lebih meningkat jika kulitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota se-Kutai Timur maka akan lebih banyak masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor sehingga kontribusi dari masing-masing pajak tersebut akan lebih meningkat.

**V. PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Camat Sangatta Utara dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Sangatta Utara senantiasa melakukan perannya sebagai *interpersonal role*, *decision making* dan *informational role* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Sangatta Utara, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
   * 1. Camat Sangatta Utara secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan *decision making* terhadap bawahannya supaya pegawainya dapat mengetahui apa yang telah di berikan oleh Camat Sangatta Utara untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Sangatta Utara, apa yang dilakukan Camat Sangatta Utara dalam mengambil kebijakan kepada pegawainya yaitu Camat Sangatta Utara selalu turun kantor lebih awal dari para pegawainya dan pulang Kantor paling terakhir dari para pegawainya. Selaku Camat Sangatta Utara tidak memaksa artinya mereka bisa melihat apa yang di berikan oleh Camat Sangatta Utara kepada bawahannya dapat ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama.
     2. Camat Sangatta Utara menjalankan peran *interpersonal role* (peranan pribadi) mampu memberikan bantuan secara terusmenerus serta mampu memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan guna mempercepat suatu proses untuk mencapai output tertentu. Yang di lakukan Camat Sangatta Utara sebagai fasilitator jika kalau tim ada kesulitan komunikasi maka Camat Sangatta Utara sebagai leader akan turun langsung ke bagian-bagian yang terkait. Dan itu di dukung oleh bawahannya karena tidak sembarangan orang dan selaku Camat Sangatta Utara akan memetakan siapa yang punya potensi, karena akan menggunakan sumber dana, sumber daya dan waktu. Camat Sangatta Utara selaku pemimpin mampu mengelola sumber daya yang ada ini secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
     3. Camat Sangatta Utara sebagai *informational role* (peranan sumber informasi) menanyakan pendapat kepada pejabat struktural, setelah mendapatkan suatu keputusan yang sama maka baru pada seluruh pegawai, sehingga ada kontribusi dalam pengambilan keputusan itu. Selaku Camat Sangatta Utara yang di lakukan dengan menajemen konflik, menajemen konflik itu di gunakan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja. Yang akan di lakukan adalah mediasi, menjembatani antara kepentingan yang berbeda untuk menyatukan kinerja yang baik dalam suatu organisasi.
2. Adapun faktor yang mendukung terlaksananya peningkatan kinerja pegawai yaitu kejujuran, integritas, objektifitas (tidak memihak), independensi, kapabilitas dan mau di ajak untuk maju.

**5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Peran Camat Sangatta Utara dalam meningkatkan kinerja pegawainya masih ada saja anggota-anggota di dalam organisasi tersebut yang tidak disiplin seperti tidak tepat turun kantor, dan maka ada salah satu dari pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Camat Sangatta Utara tidak turun kantor selama beberapa hari dan juga tidak melaksanakan tugas dan fungsisnya dengan baik, maka selaku Camat Sangatta Utara harus segera menanganinya. Saran dari penulis yaitu bagi pegawai yang tidak menjalankan suatu pekerjanya dengan baik atau tidak mematuhi peraturan yang ada sebagaimana mestinya, maka selaku Camat Sangatta Utara harus segera menindak lanjuti dengan memberikan sanksi seperti sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat sesuai dengan pelanggarannya.
2. Di dalam faktor pendukung peran Camat Sangatta Utara dalam meningkatkan kinerja pegawainya memang harus mengutamakan kejujuran, karena jika sudah tidak jujur maka semua pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang ingin di capai. Saran dari saya yaitu tidak hanya anggota saja tapi Camat Sangatta Utara selaku pemimpin harus membiasakan sikap yang jujur, karena kejujuran merupakan faktor yang mendukung terlaksananya peningkatan kinerja pegawai. Dan di dalam faktor penghambat perlu perubahan manset yaitu tata pikir, tata sikap, tata tindak dan tata bicara yang perlu di perbaiki lagi dengan saling mengintropeksi diri masing-masing untuk menyatukan suatu pendapat dan keinginan yang ingin di capai bersama-sama oleh semua pegawai.

**BIBLIOGRAFI**

Anoraga, Pandji.2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basir, Barthos. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Jakarta: Penerbit Bumi Persada.

Badeni. 2014. ***“Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi”.*** Bandung: Alfabeta

Bayu Suryaningrat, 2000, **“*Mengenal Ilmu Pemerintah*”**. Jakarta Rineka Cipta,

Dwiyanto Agus, 2005, **“*Penilaian Kerja Organisasi Publik”*,** Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Furtmengler, 2007, **“Penilaian Kinerja”,** Penerbit Andi Ofset Yokyakarta.

Hasibuan, Melayu. 2001**. “*Manajemen Sumber Daya Manusia”,***, Jakarta, Bumi Aksara

Rahmi, Sri. 2014. ***“Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi”.*** Jakarta: Mitra Wacana Media

Sedarmayanti. 2011. ***“Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil”.*** Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. ***“Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi”.*** Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wibowo. 2010. ***“Manajemen Kinerja”.*** Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

Kartono, Kartini. 2002. “***Pemimpin dan kepemimpinan”.*** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2007. ***“metodologi penilitian kualitatif.”*** Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2000. ***“Kepemimpinan yang Efektif”***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi, Hadari, 2003. **“*Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi”.*** Yogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutarto. 2001. ***“Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi”*.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siagian, Sondang. P.2003. ***“Teori dan Praktek Kepemimpinan”***. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

**Dokumen**

Perkalan Nomor 14 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja LAN

Peraturan presiden nomor 57 tahun 2013

1. Alumni Fisipol Untag 1945 Samarinda [↑](#footnote-ref-1)